



SUMBER BERITA

| | | | |
|---|-------------------|--|-----------------|
| X | RAKYAT BENGKULU | | MEDIA INDONESIA |
| | BENGKULU EKSPRESS | | KOMPAS |
| | RADAR BENGKULU | | |

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

2 Tahun Diusut Tanpa TSK

PELABAI - Pengusutan dugaan korupsi pembangunan intake dan jaringan pipa air baku di Desa Ladang Palembang, Kecamatan Lebong Utara yang sudah dua tahun, belum juga membuahkan tersangka. Tokoh masyarakat Lebong, Rozy Antoni meminta Polda Bengkulu menindaklanjuti kinerja Polres Lebong yang terkesan main-main dalam mengusut perkara ko-

rupsi senilai Rp 16,6 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2017 itu. "Kasusnya jangan digantung," kata Rozy.

Selain tidak memberikan pendidikan hukum yang baik kepada masyarakat, pengusutan proyek Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VII Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang bertele-tele itu juga dinilai berpotensi merugikan negara. Setidaknya pihak yang diduga terlibat ber-

peluang mengaburkan barang bukti. "Kalau memang pengusutannya dihentikan harus ada keterbukaan dari pihak Polres," papar Rozy.

Terlebih sejak pertengahan 2019, Polres Lebong mengaku telah mengajukan audit penghitungan kerugian negara ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bengkulu. Jika itu benar, tentu saja semakin mengundang tanya masyarakat. Diharapnya BPKP Bengkulu juga memberikan klarifikasi terkait proses audit yang berjalan lambat itu.

"Pertanyaannya apakah benar Polres sudah mengajukan audit ke BPKP," tukas Rozy.

Sementara Kapolres Lebong, AKBP. Ichsan Nur, S.IK melalui Kasat Reskrim, Andi Ahmad Bustanil, S.IK belum berhasil dikonfirmasi. Diketahui sepanjang tahun 2019, penyidik Tipikor Satreskrim Polres Lebong berulang kali memeriksa pihak BWSS VII Kementerian PUPR. Yakni RW, ED dan MZ selaku tim pengawas. Termasuk dari pihak kontraktor, PT. Duta Utama Karya.

Indikasi penyimpangan, ses-

uai pengusutan Polres Lebong yang masih berstatus penyelidikan (lid) adalah pengurangan volume pekerjaan. Baik untuk bangunan intakenya maupun bendungan airnya. Sesuai temuan tim penyidik, spesifikasi pekerjaan juga terindikasi menggunakan material yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dokumen kontrak. Termasuk pemasangan bronjong dan perpipaan air baku yang diduga menggunakan material tidak Standar Nasional Indonesia (SNI). (sca)